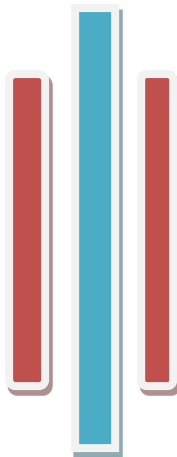


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2018



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
Jln. MT. Haryono No.05 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kode Pos 94711



BAB 1 **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dan kepemimpinan yang baik (*Good Governance*), upaya dan komitmen yang harus diaplikasikan untuk diterapkan dalam aktivitas ke pemerintahan untuk menyahtuntutan masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Olehnya itu reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima.

Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reвью laporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2018 kepada Bupati Banggai, maka Badan Pendapatan Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018.



Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 berasal dari APBD Kabupaten Banggai tahun anggaran 2018.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2018. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa *output* dan atau *outcome* dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Banggai, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai tahun 2018.

Metode penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai secara umum mengacu pada RPJMD dan SAKIP Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda Kabupaten Banggai maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib bidang Pendapatan Daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.



2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendapatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Isu Strategis

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai sebagai berikut :

- a. Belum sepenuhnya wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang berlaku, sehingga pemerintah masih harus lebih giat untuk melakukan pendekatan melalui penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak dalam usaha mengoptimalkan pencapaian sasaran ;
- b. Kurangnya Pemahaman terhadap tugas dan fungsi sehingga hasil yang didapat belum maksimal dalam menunjang peningkatan penerimaan pajak daerah;
- c. Belum ditetapkannya beberapa peraturan pelaksanaan pengelolaan pendapatan, sehingga membuat pelaksanaan pemungutan pajak daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal ;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional yang berakibat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal ;



- e. Belum dilaksanakan sistem dan prosedur secara optimal, sehingga kinerja mengalami hambatan dan belum sepenuhnya menunjang peningkatan intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah ;
- f. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan daerah ;
- g. Belum diterapkannya sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum belum secara tegas. Hal ini belum dapat menunjang meningkatnya intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah ;
- h. Belum adanya verifikasi data piutang PBB sektor perkotaan hasil peralihan dari KPP Pratama Luwuk ke Badan Pendapatan Daerah.
- i. Terbatasnya anggaran yang tersedia guna menunjang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah ;

1.4. Landasan Hukum

LKJIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 23 Tahun 2104 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, Isu Strategis, Landasan Hukum serta sistematika penyajian.
- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis Meliputi Visi Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) Capaian Indikator Kinerja Utama, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis serta Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV Penutup : Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi memaksimalkannya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada para masyarakat dan *stakeholder* Badan Pendapatan Daerah.

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas SDM dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Badan Pendapatan Kabupaten Banggai adalah terus tersusun dan terprogram setiap



rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategis diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang bertalian dengan keberadaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai saran/tujuan tertentu. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

2.1.1. Visi

Visi Kabupaten Banggai yaitu :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT
PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA”.**

Pernyataan Visi di atas, berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Bapan Pendapatan Daerah kabupaten Banggai dalam pernyataan Misi.



2.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, kaitan misi kabupaten dengan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Yaitu:

“ Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa yang dijabarkan kedalam tujuan Badan Pendapatan Daerah yaitu “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih dan Melayani

Tabel 2.1.2.

Misi - Tujuan Setelah Reviu

No	Misi	Tujuan
1.	Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan Yang Berwibawa	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.



Tabel 2.1.3
Tujuan - Sasaran Setelah Reviu

Tujuan	Sasaran
Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani	Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Banggai
Tujuan 2 : Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Berbasis Teknologi Informasi	Sasaran Strategi 2 Meningkatkan Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program prioritas dalam mewujudkan visi dan misi yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai, telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan pengukuran keberhasilan dan pelaksanaan program prioritas tersebut. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksudkan agar program pelaksanaan dan kegiatan prioritas dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan akuntabel serta tepat sasaran.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :



Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkannya Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Realisasi PAD Tahun N - Tahun Dasar X 100 % Realisasi PAD Tahun Dasar Jumlah PAD Tahun N X 100 %	Laporan Realisasi Pajak Daerah, Laporan Realisasi Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Dana Perimbangan, Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.



Tabel 2.3				
Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT)				
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN KE-N) 2018	PROGRAM
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	49,67%	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,76%	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Fasilitasi Pindah Purna Tugas PNS 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Penhembangan Sistem Informasi Data 7. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
		Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	88,75	



2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Merupakan Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah mengacu pada dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016-2021 serta Dokumen SAKIP Tahun 2018.

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Kepala Badan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	IKU	NON IKU
1.	Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	49,67 %	V	-
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah	7,78 %	V	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	-	V
		Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	-	V
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	88,75	-	V



PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1598.099.750,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 600.492.500,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 230.058.000,00
4. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS	Rp. 4.339.000,00
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 35.801.000,00
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 106.055.500,00
7. Program Pengembangan Sistem Informasi / Data	Rp. 34.938.000,00
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 3.338.852.110,00



Tabel 2.4.2
Perjanjian Kinerja Sekretaris
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Capaian Anggaran Peningkatan Sarana dan Prasarana	100%
3.	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Dalam Penggunaan Pakaian Dinas Yang Sesuai Aturan	100%
4.	Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	Persentase Tersedianya Pelayanan Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	100%
5.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Yang Mengikuti Kegiatan Bimtek dan Diklat	100%
		Persentase Tersedianya Kegiatan Pembinaan, Pemantauan Kerja Aparatur dan Pemuktahiran Data Pegawai	100%
6.	Meningkatnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tersedianya Laporan Capaian Kinerja, Laporan Keuangan, Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	100%
7.	Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi / Data	Persentase Jumlah Dokumen Informasi / Data	100%



PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1598.099.750,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 600.492.500,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 230.058.000,00
4. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS	Rp. 4.339.000,00
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 35.801.000,00
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 106.055.500,00
7. Program Pengembangan Sistem Informasi / Data	Rp. 34.938.000,00



Tabel 2.4.3
Perjanjian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.400 Lembar
2.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun
3.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Penyediaan Pembayaran STNK Motor	29 Unit
		Jumlah Penyediaan Pembayaran STNK Mobil	3 Unit
4.	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	4 Triwulan
		Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	2 Orang
5.	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	4 Triwulan
6.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Triwulan
7.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4 Triwulan
8.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Triwulan
9.	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	4 Triwulan
10.	Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	4 Triwulan
11.	Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4 Triwulan
12.	Tersedianya Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	40 Orang



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
13.	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	3 Unit
14.	Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 Paket
15.	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3 Paket
16.	Terpenuhinya Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	3 Paket
17.	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	29 Unit
18.	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8 Unit
19.	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	21 Unit
20.	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik	1 Paket
21.	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	102 Pasang
22.	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	138 Pasang
23.	Tersedianya Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Yang Pensiun	1 Orang
24.	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Kegiatan Bimtek dan Diklat	1 Ls
25.	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	1 Laporan



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
26.	Tersedianya Profil Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah	1 Dokumen
27.	Tersedianya Pemuktahiran Data Pegawai	Jumlah Kegiatan Pemuktahiran Data Pegawai	1 Triwulan
28.	Terlaksananya Pembinaan Petugas Pemungut PAD-PBB, KUPT, Petugas Pemungutan	Jumlah Petugas Pemungut PAD-PBB, KUPT dan Petugas Pemungutan	64 Orang

	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	8.400.000,00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	141.000.000,00
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp	11.300.000,00
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp	31.537.750,00
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	60.784.000,00
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	19.837.000,00
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	7.641.000,00
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	4.800.000,00
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	18.800.000,00
10.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp	544.000.000,00
11.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp	168.000.000,00
12.	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Rp	582.000.000,00
13.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp	71.500.000,00
14.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp	24.008.300,00
15.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp	398.504.200,00
16.	Pengadaan Meubelair	Rp	41.870.000,00
17.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Rp	38.500.000,00
18.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp	3.360.000,00
19.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp	17.750.000,00
20.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik	Rp	5.000.000,00
21.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp	147.396.000,00
22.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Rp	82.662.000,00
23.	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Rp	4.339.000,00
24.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp	24.000.000,00



25.	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Rp	11.801.000,00
26	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Rp	9.668.000,00
27.	Pemuktahiran Data Pegawai	Rp	25.250.000,00
28.	Pembinaan Petugas Pemungut PAD-PAD, KUPT Petugas Pemungutan	Rp	38.927.000,00



Tabel 2.4.4
Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan dan Aset

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Penatausahaan Aset Semesteran	8 Laporan
2.	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Penatausahaan Aset Akhir Tahun	8 Laporan
		Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP

KEGIATAN

ANGGARAN

1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Rp	19.970.000,00
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp	18.498.000,00



Tabel 2.4.5
Perjanjian Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP SKPD	1 Dokumen
		Nilai / Predikat Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	85 (A)
2.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	5 Dokumen
3.	Tersusunnya Profil SKPD	Jumlah Dokumen Profil SKPD	1 Dokumen

	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 21.038.500,00
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Rp 46.549.000,00
3.	Penyusunan Profil SKPD	Rp 9.668.000,00



Tabel 2.4.6
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pajak Daerah

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	100 %

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------|
| 1. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp | 928.920.360,00 |
|----|---|-----------|-----------------------|



Tabel 2.4.7
Perjanjian Kinerja Kepala sub. Bidang pendataan dan pendaftaran pajak daerah
Badan pendapatan daerahkabupaten banggai

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pemuktakhiran Data, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah	Tersedianya Data Pajak Daerah	4.003WP
		Terlaksananya Penerbitan NPWPD	4.000 WP
2.	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Apraisal Pajak Daerah	8 Dokumen

	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah	Rp.	162.687.000,00
2.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah - Pajak Daerah	Rp.	214.123.000,00



Tabel 2.4.8

**Perjanjian Kinerja Kepala sub bidang penetapan pajak daerah
Badan pendapatan daerah kabupaten banggai**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pemuktakhiran Data, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	Rp. 36.250.000.000
		Persentase Wajib Pajak Yang Keberatan dan Diproses	100 %

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penetapan dan Penyelesaian Doleansi Pajak Daerah Rp 222.531.000,00



Tabel 2.4.9

Perjanjian Kinerja Kepala sub. Bidang pendataan dan pendaftaran pajak daerah
Badan pendapatan daerahkabupaten banggai

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pemuktakhiran Data, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp. 36.250.000.000
		Jumlah Survey/Uji Petik Pajak Daerah	8 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penagihan dan Uji Petik Pajak Daerah

Rp 286.870.360,00



Tabel 2.4.10
Perjanjian Kinerja Kepala bidang retribusi dan lain-lain pendapatan
Badan pendapatan daerahkabupaten banggai

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah	Persentase Pencapaian Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	100 %

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------|
| 1. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp | 588.687.550,00 |
|----|---|-----------|-----------------------|



Tabel 2.4.11
Perjanjian Kinerja Kepala bidang retribusi dan lain-lain pendapatan
Badan pendapatan daerah kabupaten banggai

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah	Persentase Pencapaian Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	100 %

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------|
| 1. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp | 588.687.550,00 |
|----|---|-----------|-----------------------|



Tabel 2.4.11
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pendataan Retribusi Dan Lain-Lain Pendapatan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Terlaksananya Pemuktakhiran Data, Penetapan dan Analisis Potensi Retribusi Daerah	Jumlah Data Retribusi Daerah	3 Jenis Retribusi
		Jumlah Ketetapan Retribusi Daerah	Rp 26.049.930.000,-
		Jumlah Analisis, Survey / Pendataan Wajib Pajak Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah.	2 Dokumen

	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pendataan, Penetapan dan Analisis Potensi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	Rp 91.656.500,00



Tabel 2.4.12
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Retribusi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pengawasan, Uji Petik dan Penyelesaian Doleansi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	Jumlah Survey / Uji Petik Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	2 Dokumen
		Persentase Wajib Retribusi Retribusi Daerah Yang Mengajukan Keberatan dan Diproses	100 %

	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pengawasan, Uji Petik dan Penyelesaian Doleansi Retribusi Daerah & Lain-Lain PAD Yang Sah	Rp 438.531.050,00



Tabel 2.4.13
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Lain-Lain Pendapatan
Badan Pendapatan Daerah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah & Lain-Lain PAD Yang Sah	Jumlah Dokumen Apraisal Retribusi dan Lain-Lain PAD Yang Sah	4 Dokumen

	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah - Retribusi & Lain-Lain PAD Yang Sah	Rp 58.500.000,00



Tabel 2.4.14
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang PBB / BPHTB

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tercapainya Penerimaan BPHTB	Target PBB / Persentase Penerimaan Pajak PBB dan BPHTB	100 %

	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.310.401.000,00



Tabel 2.4.15

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pendataan Dan Penetapan PBB/BPHTB

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pemuktahiran Data dan Penetapan PBB	Jumlah Data PBB	181.769 SPPT
		Jumlah Ketetapan PBB	Rp. 6.480.712.645
		Jumlah Kegiatan Penyerahan SPPT Kelurahan / Desa	337 Desa / Kelurahan
2.	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Apraisal PBB dan BPHTB	2 Dokumen

	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pemuktahiran Data, Penetapan PBB dan Penyerahan SPPT Kelurahan / Desa	Rp 504.101.000,00
2.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan - PBB / BPHTB	Rp 83.510.000,00



Tabel 2.4.16

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Penagihan Dan Penerimaan PBB/BPHTB

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Penagihan dan Uji Petik Penerimaan PBB / BPHTB	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak PBB	Rp 6.622.956.000
		Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB	Rp 2.500.000.000

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penagihan dan Uji Petik PBB / BPHTB	Rp 254.170.000,00



Tabel 2.4.17

Perjanjian Kinerja Kepala sub. Bidang verifikasi dan keberatan PBB/BPHTB

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2 serta Penyelesaian Doleansi PBB dan BPHTB	Jumlah Wilayah Pengawasan	23 Kecamatan
		Jumlah Penilaian Objek PBB-P2	3 Dokumen
		Persentase Penyelesaian Doleansi PBB dan BPHTB	100 %

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | | | |
|----|---|----|----------------|
| 1. | Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2 serta Penyelesaian Doleansi PBB dan BPHTB | Rp | 468.620.000,00 |
|----|---|----|----------------|



Tabel 2.4.18
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perimbangan Dan Pendapatan Lain-Lain

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tercapainya Target Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Persentase Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	100 %

	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 472.279.200,00



Tabel 2.4.19
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Verifikasi dan Klarifikasi Transfer Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Jumlah Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 1.786.000.722.146,-

KEGIATAN

ANGGARAN

1.	Verifikasi dan Klarifikasi Transfer Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 291.085.900,00
----	---	-------------------



Tabel 2.4.20
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Evaluasi dan Sikronisasi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Penerimaan dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4 Triwulan

	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Evaluasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 97.679.800,00



Tabel 2.4.21

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Monitoring Dan Evaluasi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pemuktahiran Data dan Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Jumlah Dokumen Data Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6 Dokumen

	KEGIATAN		ANGGARAN
	Pemuktahiran Data dan Pendapatan Dana		
1.	Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	83.513.500,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan sesuai tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun renja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksana kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2018 dengan realisasinya.

Target capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :



Tabel 3.1
Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Tahun 2017
Sebelum Reviu

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)
1.	Meningkatkan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur dan Transparansi Pelayanan	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	85 %
		Tingkat Penggunaan Sarana dan Prasarana.	85 %
		Tingkat Kedisiplinan Aparatur.	85 %
		Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80 %
		Terpenuhinya Kewajiban Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Keuangan SKPD.	80 %
		Jumlah Realisasi Penggunaan Data/Informasi SKPD oleh Masyarakat.	90 %
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	Tingkat Pertumbuhan Potensi Pajak Daerah	10 %
		Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	10,5 %
3.	Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Efektif	Tingkat Penggunaan Website dan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Masyarakat	50 %
4.	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Melakukan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	80 %

Sesuai dengan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu Membantu Bupati Banggai melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Meliputi urusan Wajib Bidang Pendapatan serta fungsinya yaitu perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya serta penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan makan untuk



mengukur tingkat capaian kinerja **Setelah Reviu** Badan Pendapatan Daerah dapat diukur melakukan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun N- Tahun Dasar}}{\text{Realisasi PAD Tahun Dasar}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Jumlah PAD Tahun N}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah Tahun N}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X > 85$: Sangat Berhasil
$70 < X < 85$: Berhasil
$55 < X < 70$: Cukup Berhasil
$X < 55$: Tidak Berhasil



3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan tersebut telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.



Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Sebelum Reviu

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatkan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur dan Transparansi Pelayanan	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	85 %	98,90 %	116,35%
		Tingkat Penggunaan Sarana dan Prasarana.	85 %	100 %	117,65%
		Tingkat Kedisiplinan Aparatur.	85 %	100 %	117,65%
		Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	80 %	99,99 %	124,99%
		Terpenuhinya Kewajiban Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Keuangan SKPD.	80 %	87,60 %	109,50%
		Jumlah Realisasi Penggunaan Data/Informasi SKPD oleh Masyarakat.	90 %	96,64 %	107,38%
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	Tingkat Pertumbuhan Potensi Pajak Daerah	10 %	18,82 %	188,20%
		Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	10,5 %	12,59 %	119,90%
3.	Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Efektif	Tingkat Penggunaan Website dan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Masyarakat	50 %	40 %	80,00 %
4.	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Melakukan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	80 %	95,21 %	119,00%



Dari tabel di atas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4 (empat) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 3 (tiga) sasaran dan kategori capaian sasaran berhasil 1 (satu) sasaran.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja laporan kinerja instansi pemerintah dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah setiap instansi pemerintah wajib melaporkan kemajuan atas mandat dan sumber daya yang digunakan. Sesuai dengan perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 dan indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah setidaknya terdapat 1 (Satu) sasaran Strategis, 3 (Tiga) Indikator yang harus diwujudkan ditahun ini yaitu.

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 Setelah Reviu

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PER TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkannya Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34,67%	49,67%	64,67%	79,67%	94,67%
	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	7,78%	8,76%	10,29%	12,04%	13,97%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	86,98	88,75	90,53	92,30	94,08



Dari tabel diatas dapat disimpulkan dari 3 indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah di Tahun 2018 indikator yang masuk kategori baik yaitu kategori indek kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah hal ini membuktikan bahwa capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah sudah sesuai dengan misi pemerintah Kabupaten Banggai yaitu Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih menuju Pemerintahan yang berwibawa dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani serta sasaran Badan pendapatan Daerah yaitu meningkatkan Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banggai.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja laporan kinerja instansi pemerintah dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 disajikan sebagai berikut

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Banggai

Indikator Kinerja 1 : Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sasaran 2 : Meningkatnya Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah.

Indikator Kinerja 2 : Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan



yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2018 Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai sesuai dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun 2018 terdiri dari :

a. Pendapatan

Dalam struktur APBD Pendapatan berada di posisi paling atas dimana setiap dalam pembahasan yang pertama adalah pendapatan. Badan Pendapatan Sebagai Organisasi Pengelola PAD ditahun 2018 menargetkan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari beberapa Pajak Daerah sebesar Rp. 54.900.000.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.542.854.130,71 atau 79,31 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Pendapatan Asli Daerah 2018

No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	Pendapatan Asli Daerah	54.900.000.000,00	43.542.854.130,00	79,31 %
01.	Pajak Hotel	2.150.000.000,00	2.155.222.804,09	100,24 %
02.	Pajak Restoran	9.000.000.000,00	9.244.106.752,58	102,71 %
03.	Pajak Hiburan	250.000.000,00	251.594.575,00	100,64 %
04.	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.059.245.660,50	105,92 %
05.	Pajak Penerangan Jalan	17.000.000.000,00	15.679.300.067,00	92,23 %
06.	Pajak Parkir	150.000.000,00	151.359.527,00	100,91 %
07.	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	473.542.152,24	18,94 %
08.	Pajak Mineral Bukan Logam	12.000.000.000,00	4.888.699.392,00	40,74 %
09.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.500.000.000,00	2.955.276.704,00	84,44 %

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, tahun anggaran 2018 Badan Pendapatan Daerah



Kabupaten Banggai mengalokasikan belanja langsung sebesar Rp. 5.948.635.860,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.854.387.001,00 atau 98,42% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.598.099.750,00	1.549.831.436,00	96,98
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.400.000,00	8.400.000,00	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.000.000,00	105.534.063,00	74,85
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ operasional	11.300.000,00	11.300.000,00	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31.537.750,00	31.537.750,00	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.784.000,00	60.784.000,00	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.837.000,00	19.837.000,00	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.641.000,00	7.641.000,00	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000,00	3.280.000,00	68,33



No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	Penyediaan Makanan dan Minuman	18.800.000,00	18.800.000,00	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	544.000.000,00	543.757.623,00	99,96
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	168.000.000,00	167.960.000,00	99,98
	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	582.000.000,00	571.000.000,00	98,11
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	600,492,500,00	588.809.700,00	98,05
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	71.500.00,00	71.500.00,00	100
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24.008.300,00	23.895.000,00	99.53
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	398.504.200,00	394.934.700,00	99.10
	Pengadaan Meubelair	41.870.000,00	41.870.000,00	100
	Pemeliharaan Rutin / Berkala / Kendaraan Dinas/Operasional	38.500.000,00	38.500.000,00	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.360.000,00	3.360.000,00	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	17.750.000,00	9.750.000,00	54.93
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	100



No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	230.058.000,00	230.058.000,00	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	147.396.000,00	147.396.000,00	100
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	82.662.000,00	82.662.000,00	100
4	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	4.339.000,00	4.339.000,00	100
	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	4.339.000,00	4.339.000,00	100
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.801.000,00	35.801.000,00	100
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	24.000.000,00	24.000.000,00	100
	Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Aparatur	11.801.000,00	11.801.000,00	100
6	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	106.055.500,00	106.004.500,00	99.95
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.038.500,00	21.038.500,00	100
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	19.970.000,00	19.970.000,00	100



No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	18.498.000,00	18.447.000,00	99.72
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	46.549.000,00	46.549.000,00	100
7	Program Pengembangan Sistem Informasi / Data	34.938.000,00	34.835.000,00	99.71
	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	9.668.000,00	9.668.000,00	100
	Pemutakhiran Data Pegawai	25.250.000,00	25.147.000,00	99.59
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.276.225.110,00	3.242.386.365,00	98,97
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi	66.500.000,00	62.832.000,00	94.48
	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	234.123.000,00	233.775.500,00	99.95
	Pemutakhiran Data, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	212.036.000,00	209.401.000,00	98.76
	Penagihan Uji Petik dan Penagihan PBB	254.170.000,00	253.649.000,00	99,80
	Pengawasan dan Pelaksanaan Barang Quasi	116.740.000,00	105.400.000,00	90.29
	Penagihan Pajak Daerah	277.365.360,00	272.894.500,00	98.39



No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	Sosialisasi Pajak Daerah	42.709.000,00	42.709.000,00	100
	Analisis Potensi Retribusi Daerah	0	0	0
	Intensifikasi dan Eksentifikasi Retribusi Daerah	58.500.000,00	58.340.000,00	99.73
	Penilaian Objek PBB-P2	405.250.000,00	403.183.000,00	99.49
	Pemutakhiran Data Retribusi dan Lain-lain Pendapatan	81.311.500,00	81.311.500,00	100
	Pengawasan Lapangan Spanduk dan Reklame se-Kabupaten Banggai	40.835.000,00	39.935.000,00	97.80
	Rapat Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun N+1 dan Evaluasi Penerimaan Daerah Tahun N-1 dan Tahun N	2.637.000,00	2.637.000,00	100
	Pemutakhiran Data dan Penetapan PBB	68.625.000,00	68.625.000,00	100
	Pekan Panutan dan Penyerahan SPPT Kelurahan / Desa	435.476.000,00	431.441.000,00	99.07
	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-sumber PBB	83.510.000,00	83.367.000,00	99.83
	Penyelesaian Keberatan PBB dan BPHTB	36.670.000,00	36.609.000,00	99.93
	Monitoring dan Pengawasan Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan	184.986.250,00	183.908.200,00	99.42



No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	Rapat Kordinasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan	8.000.000,00	7.194.000,00	89.93
	Penyusunan Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan	2.345.000,00	2.345.000,00	100
	Kordinasi Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah	25.761.800,00	25.461.800,00	98.84
	Sosialisasi Penyelesaian Retribusi Daerah	111.043.000,00	111.043.000,00	100
	Koordinasi dan Optimalisasi Dana Transfer/Perimbangan Pemerintah Pusat dan Provinsi	194.502.300,00	194.587.266,00	99.99
	Penyusunan Pelaporan Realisasi Pendapatan Lain-lain	11.440.000,00	11.440.000,00	100
	Koordinasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	96.483.600,00	96.420.300,00	99.93
	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain	97.679.800,00	97.304.800,00	99.62
	Pendataan Potensi Bagi Hasil Pusat dan Provinsi	72.073.500,00	71.568.500,00	99.30
	Monitoring dan Pengendalian PAD	52.027.000,00	51.679.000,00	99.33
	Penyelesaian Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah	3.325.000,00	3.325.000,00	100



No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
16	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	62.627.000q,00	62.322.000,00	99,51
	Pembinaan Petugas Pemungut PAD-PBB, KUPT, Petugas Pemungutan	35.972.000,00	35.883.000,00	99.88
	Monitoring dan Pengendalian PBB	26.700.000,00	26.439.000,00	99.02

**c. Belanja Tidak Langsung**

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, tahun anggaran 2018 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.934.360.486,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 10.358.317.768,00 atau 62,67 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2018

No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
5	BELANJA	17.882.996.346,00	16.212.704.769,00	90,66
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.934.360.486,00	10.358.317.768,00	86,79
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	11.934.360.486,00	10.358.317.768,00	86,79
	Gaji dan Tunjangan	6.356.775.050,00	5.952.870.157,00	93,65
	Gaji Pokok PNS	4.669.495.179,00	4.300.886.438,00	92,11
	Tunjangan Keluarga	414.412.502,00	400.904.150,00	96,74
	Tunjangan Jabatan	207.680.750,00	205.385.000,00	98,89
	Tunjangan Jabatan Fungsional Umum	197.073.000,00	191.295.000,00	97,07
	Tunjangan Beras	247.314.300,00	240.651.660,00	50,68
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	658.152,00	333.537,00	50,68
	Pembulatan Gaji	70.644,00	68.999,00	97,67
	Iuran Asuransi	124.883.500,00	120.445.810,00	96,45
	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	64.440.000,00	64.440.000,00	100
	Biaya Pemungutan PBB	64.440.000,00	64.440.000,00	100



No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	Tambahan Penghasilan	3.225.172.459,00	2.820.997.984,00	87,47
	Tambahan Penghasilan PNS	3.225.172.459,00	2.820.997.984,00	87,47
	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	63.000.000.000,00	63.000.000.000,00	100
	Biaya Pemungutan PBB	63.000.000.000,00	63.000.000.000,00	100
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.784.600.000,00	2.014.359.190,00	72,34
	Insentif Pemungutan Pajak Hotel	107.500.000,00	107.500.000,00	100
	Insentif Pemungutan Pajak Restoran	450.000.000,00	443.837.500,00	98,63
	Insentif Pemungutan Pajak Hiburan	12.500.000,00	12.500.000,00	100
	Insentif Pemungutan Pajak Reklame	50.000.000,00	50.000.000,00	100
	Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	889.600.000,00	677.100.000,00	76,11
	Insentif Pemungutan Pajak Parkir	7.500.000,00	7.500.000,00	100
	Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah	125.000.000,00	18.750.000,00	15,00
	Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000,00	290.000.000,00	48,33
	Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	367.500.000,00	275.625.000,00	75,00
	Insentif Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	175.000.000,00	131.546.690,00	75,17



BAB IV

PENUTUP

A. PENGUKURAN KINERJA

Dari keseluruhan 2 (Dua) sasaran telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2018. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang mampu menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Sebagai bagian penutup dari LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai ini dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem perencanaan dan landasan dalam merancang target penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.



B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhan belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sangat tergantung dari kinerja pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Banggai. Kemudian dalam Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk meningkatkan kinerja perencanaan di masa yang akan datang dan mengatasi probelamtika terhadap pencapaian target pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai telah menempuh berbagai langkah dan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai, sehingga dapat lebih efektif dalam memenuhi tuntutan tantangan pencapaian target penerimaan di masa mendatang, melalui :
 - a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur petugas pajak daerah;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan "*reward dan punishment*" secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa perencana untuk mendukung kualitas perencanaan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan.



- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan guna suksesnya pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola "top down" menjadi "bottom up" sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan program dan kegiatan.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.